

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KAWASAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Fathiatul Rizki Amandita^{1*}, Taufik Arbain², Raditia³

^{1,2} Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia.

³ Universitas Sapta Mandiri, Kabupaten Balangan, Indonesia.

^{1,2} Jl. Brigjend H. Hasan Basri Jl. Kayu Tangi, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, Indonesia.

³ Batu Piring Km 1,5 Depan, Lingsir, Kec. Paringin Sel., Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan 71611, Indonesia.

Email : Fathiatulrizki@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received,

1 June 2026

Revised,

16 June 2026

Accepted,

18 June 2026

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan,
Kebijakan Pemerintah,
Pariwisata.

Keywords: Policy
Implementation,
Government Policy,
Tourism.

Abstrak

Kawasan Loksado pada dasarnya mampu melakukan tahapan pembangunan dengan melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan pariwisata Loksado. Namun tidak sepenuhnya didukung oleh kualitas sumber daya manusia lantaran masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pariwisata, minimnya anggaran sehingga menjadi penghambat pengembangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari para aktor informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata yang diterapkan di kawasan Loksado dalam aspek pengembangan destinasi bahwa terjalinya kerjasama antar stakeholder dalam peningkatan sarana prasarana, aspek pengembangan pemasaran dinas memanfaatkan media cetak, media elektronik, media sosial serta dengan mengadakan event tahunan dalam melakukan promosi, aspek Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu banyaknya potensi pariwisata dan di kolaborasikan dengan ekonomi kreatif salah satunya seperti kerajinan tangan maupun kuliner, maka dua kolaborasi ini di anggap mampu memberi nilai tambah terhadap daya tarik dan daya saing pariwisata kawasan Loksado.

Abstract

The Loksado area is basically able to carry out development stages through the Tourism Destination Development Program, Tourism Marketing Development and Tourism Resources Development and Creative Economy which can improve the welfare of the community and the development of Loksado tourism. However, it is not fully supported by the quality of human resources due to the lack of public understanding of tourism, the lack of budget so that it becomes an obstacle to development. The method used is a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation from key informant actors. The results of the study show that the Implementation of Tourism Development Policies applied in the Loksado area in the aspect of destination development that the establishment of cooperation between stakeholders in improving infrastructure, aspects of marketing development of offices utilizing print media, electronic media, social media and by holding annual events in conducting promotions, aspects of Tourism Resources Development and Creative Economy namely the many tourism potentials and collaborated with the creative economy one of which is handicrafts and culinary, then these two collaborations are considered able to provide added value to the attractiveness and competitiveness of tourism in the Loksado area.

PENDAHULUAN

Pariwisata dalam perspektif pembangunan kontemporer telah mengalami transformasi paradigma dari sekadar aktivitas rekreatif menjadi instrumen strategis pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan (Ismayanti, 2010; Muljadi, 2009). Sektor ini tidak hanya diposisikan sebagai sumber devisa dan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga sebagai wahana penguatan identitas lokal, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat (Yoeti, 2002). Dalam konteks tersebut, negara memiliki peran sentral dalam mengarahkan pembangunan pariwisata melalui kebijakan publik yang bersifat regulatif, adaptif, dan berkelanjutan (Widodo, 2007; Winarno, 2002).

Di Indonesia, landasan normatif pengembangan kepariwisataan ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menandai pergeseran pendekatan pembangunan pariwisata dari sekadar orientasi pertumbuhan ekonomi menuju pendekatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable tourism development*). Regulasi tersebut menekankan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus berlandaskan pada prinsip manfaat, keberlanjutan, partisipasi masyarakat, serta keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan kelestarian lingkungan (Fletcher, 2019).

Dalam kerangka implementasi kebijakan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia telah merumuskan arah pembangunan pariwisata nasional yang mencakup penguatan akses ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha lokal, serta peningkatan kesejahteraan berbasis potensi wilayah. Selain itu, pembangunan pariwisata diarahkan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, memperkuat daya saing destinasi melalui manajemen pemasaran yang kompetitif (Lupiyoadi, 2013), memperluas pasar wisata (Tjiptono, 2015), serta membangun tata kelola sektor pariwisata yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Rasoolimanesh, Ringle, Jaafar, & Ramayah, 2017).

Dalam perspektif kebijakan destinasi, pengembangan pariwisata unggulan di Indonesia juga mengacu pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 37 Tahun 2007 yang menetapkan kriteria destinasi unggulan, meliputi ketersediaan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, daya tarik wisata, aksesibilitas, potensi pasar, keterlibatan masyarakat, serta posisi strategis destinasi dalam pembangunan daerah. Secara konseptual, kriteria tersebut selaras dengan pendekatan 3A (*attraction, amenities, accessibility*) yang menjadi fondasi utama dalam pembangunan destinasi wisata berdaya saing (Gunn, 2002). Ketiga elemen ini tidak hanya menentukan kualitas pengalaman wisatawan, tetapi juga merefleksikan tingkat kesiapan suatu wilayah dalam mengelola potensi pariwisatanya secara berkelanjutan serta menjamin aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengunjung (Khalik, 2014; Lie et al., 2024).

Pada level regional, Provinsi Kalimantan Selatan menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu instrumen utama dalam strategi pembangunan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal. Hal ini tercermin dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016–2021 yang menekankan pengembangan daya saing ekonomi daerah dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan. Dalam dokumen perencanaan strategis tersebut, pariwisata tidak hanya dipahami sebagai sektor ekonomi, tetapi juga sebagai sistem pembangunan yang melibatkan integrasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha (Pratt, 2015).

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu wilayah yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan pariwisata di Kalimantan Selatan. Kawasan Loksado yang berada di wilayah ini telah ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) karena memiliki karakteristik geografis dan ekologis yang khas, khususnya sebagai bagian dari ekosistem Pegunungan Meratus yang memiliki potensi *geopark*. Keunikan bentang alam, keanekaragaman hayati, serta kekayaan budaya lokal menjadikan Loksado sebagai destinasi dengan daya tarik tinggi, baik pada tingkat nasional maupun internasional (Dwityas & Briandana, 2017).

Pembagian wilayah pengembangan pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke dalam tiga Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) menunjukkan adanya strategi perencanaan spasial yang berbasis pada potensi dan karakteristik masing-masing wilayah. WPP I diarahkan sebagai kawasan wisata alam dan petualangan, WPP II difokuskan pada pengembangan wisata perkotaan seperti religi, kuliner, dan minat khusus, sedangkan WPP III dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis ekosistem sungai dan rawa. Kebijakan pembagian wilayah tersebut mencerminkan pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal (*place-based development*) yang bertujuan untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif setiap kawasan serta mendukung pengembangan pariwisata daerah secara lebih terarah, berkelanjutan, dan berdaya saing (Yoeti, 2002).

Secara empiris, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi sumber daya pariwisata yang cukup besar. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Tahun 2019–2034, terdapat sedikitnya 14 destinasi wisata alam yang tersebar di berbagai kecamatan. Keberadaan destinasi seperti Wisata Alam Loksado, Air Terjun Haratai, Air Panas Tanuhi, Danau Bangkau, hingga Telaga Bidadari menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki diversifikasi produk wisata yang relatif lengkap. Namun demikian, potensi tersebut memerlukan pengelolaan dan pengembangan strategi pemasaran yang terintegrasi agar mampu memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat lokal (Tjiptono, 2015).

Kawasan Loksado sebagai salah satu destinasi unggulan telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan melalui pengembangan produk wisata seperti *bamboo rafting*, wisata air terjun, serta wisata pemandian

air panas. Selain daya tarik alam yang kuat, kawasan ini juga didukung oleh ketersediaan infrastruktur dasar pariwisata seperti aksesibilitas jalan, fasilitas penginapan, area parkir, serta fasilitas penunjang lainnya. Meskipun demikian, keberadaan fasilitas tersebut masih perlu terus ditingkatkan dalam rangka memperkuat daya saing destinasi dan memperpanjang lama tinggal wisatawan (*length of stay*) melalui peningkatan standar kenyamanan dan keselamatan objek wisata (Khalik, 2014; Lie et al., 2024).

Dalam konteks tata kelola pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata telah merumuskan berbagai program strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2018–2023. Program tersebut meliputi pengembangan destinasi pariwisata, penguatan pemasaran pariwisata, serta pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif. Implementasi program ini mencakup kegiatan peningkatan infrastruktur, pengelolaan objek wisata, promosi destinasi, penyelenggaraan *event* pariwisata, hingga penguatan kapasitas pelaku wisata lokal.

Franklin dan Ripley menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang terjadi setelah penetapan kebijakan formal yang memberikan otorisasi terhadap pelaksanaan program, termasuk distribusi manfaat dan pencapaian output yang telah ditetapkan (Winarno, 2002). Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan interaksi antar aktor kebijakan dalam upaya mencapai tujuan yang telah dirumuskan (Purwanto & Sulistyastuti, 2012; Widodo, 2007). Dalam konteks kebijakan pengembangan pariwisata, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sinergi antar pemangku kepentingan dalam mengoperasionalkan program pengembangan destinasi, pemasaran, serta penguatan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif guna mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Lebih lanjut, Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas penguatan, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana. Dalam konteks pengembangan pariwisata, variabel-variabel tersebut menjadi sangat relevan mengingat kompleksitas aktor yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat lokal, pelaku usaha, hingga wisatawan sebagai pengguna layanan.

Berdasarkan kerangka regulatif, potensi empiris, serta dinamika implementasi kebijakan tersebut, terlihat bahwa pengembangan pariwisata di kawasan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki peluang sekaligus tantangan yang kompleks. Di satu sisi, terdapat dukungan kebijakan yang kuat serta potensi sumber daya alam yang besar, namun di sisi lain masih terdapat persoalan terkait optimalisasi implementasi kebijakan dalam pengelolaan destinasi wisata (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Loksado dilaksanakan, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam proses implementasi tersebut. Kajian ini menjadi penting tidak hanya untuk kepentingan akademik, tetapi juga sebagai kontribusi dalam perumusan kebijakan pembangunan pariwisata yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Metode ini menekankan pada penggalian makna, proses, serta dinamika sosial yang terjadi di lapangan melalui deskripsi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Lokasi penelitian berada di kawasan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, masyarakat sekitar, serta wisatawan, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi, jurnal, dan literatur terkait kebijakan pariwisata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan di lapangan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga akhir penelitian untuk memastikan validitas temuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di kawasan Loksado.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada program pengembangan destinasi pariwisata, fokus utama diarahkan pada peningkatan aksesibilitas, pembangunan fasilitas wisata, serta penguatan daya tarik utama kawasan Loksado. Akses jalan menuju lokasi wisata seperti air terjun Haratai, pemandian air panas Tanuhi, dan kawasan bamboo rafting telah dapat dilalui kendaraan roda empat, sehingga menunjukkan adanya peningkatan infrastruktur

dasar. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembangunan fasilitas penunjang seperti dermaga bamboo rafting Ni'ih melalui dukungan lintas pemerintah, termasuk pemerintah provinsi dan pusat. Meskipun demikian, pengembangan destinasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran serta pemeliharaan fasilitas yang belum optimal, sehingga beberapa infrastruktur masih membutuhkan peningkatan kualitas dan keberlanjutan pengelolaan. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama karena sektor pariwisata belum menjadi prioritas utama dalam alokasi pembangunan daerah, sehingga pengembangan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Keberhasilan pengembangan destinasi wisata ditentukan oleh ketersediaan akses yang mudah, fasilitas yang memadai, serta daya tarik wisata yang unik dan mampu memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan (Yoeti, 2008)

Pengembangan pemasaran pariwisata, Disporapar Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memanfaatkan berbagai media promosi untuk memperkenalkan Kawasan Loksado kepada wisatawan. Promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube yang dianggap paling efektif karena mampu menjangkau audiens lebih luas dan bersifat real-time. Hal ini juga didukung oleh sinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta partisipasi masyarakat lokal melalui kelompok sadar wisata (POKDARWIS). Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah keterbatasan yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaannya, terutama pada aspek keterbatasan anggaran, belum optimalnya sumber daya manusia, serta kurangnya keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan dan promosi pariwisata. Meskipun arah kebijakan sudah jelas, keberhasilan implementasi masih memerlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas, serta perluasan kolaborasi multipihak agar pengembangan pariwisata dapat berjalan lebih berkelanjutan dan kompetitif.

Spillane (1994) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengembangkan atraksi wisata, kemudahan aksesibilitas, serta ketersediaan fasilitas pendukung. Ketiga unsur ini harus dikelola secara terpadu agar pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain itu, promosi juga dilakukan melalui media elektronik, media cetak, serta penyelenggaraan event pariwisata seperti Festival Loksado dan dukungan kegiatan tingkat provinsi seperti Tour de Loksado. Event tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperkuat citra destinasi. Namun, efektivitas pemasaran masih belum maksimal karena belum adanya kerja sama yang kuat dengan pihak swasta seperti agen perjalanan online dan event organizer, sehingga distribusi promosi wisata masih terbatas pada jaringan pemerintah.

Richard Florida (2002) dalam konsep *creative economy* menegaskan bahwa ekonomi kreatif berkembang berdasarkan kreativitas manusia, pengetahuan, dan inovasi yang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi di era modern, termasuk dalam sektor pariwisata. Pada program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, pemerintah daerah melalui Disporapar telah melakukan berbagai upaya pembinaan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi pendataan pelaku ekonomi kreatif, pelatihan (*workshop*), serta fasilitasi kegiatan ekonomi kreatif seperti expo. Program ini mencakup berbagai subsektor ekonomi kreatif, antara lain kuliner, kriya, fotografi, desain, musik, aplikasi, dan seni pertunjukan. Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengembangkan usaha berbasis pariwisata sehingga memberikan dampak ekonomi langsung. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi kreatif serta keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan usaha dan pemasaran produk. Ketiga program tersebut menunjukkan bahwa implementasi pengembangan pariwisata di Kawasan Loksado telah berjalan cukup baik dan menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi lokal.

Analisis teori Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kawasan Loksado dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu kejelasan tujuan kebijakan yang sudah mengacu pada Renstra daerah, keterbatasan sumber daya terutama anggaran dan SDM, struktur organisasi yang cukup jelas, sikap pelaksana yang relatif mendukung, komunikasi antarorganisasi yang belum optimal terutama dengan pihak swasta, serta kondisi sosial masyarakat yang masih beragam dalam mendukung pengembangan pariwisata. (Subarsono, 2016).

Selain itu, Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Loksado telah berjalan secara aktif melalui berbagai program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar). Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah melakukan peningkatan aksesibilitas menuju lokasi wisata, pembangunan dan pengembangan fasilitas pendukung, serta koordinasi lintas sektor dengan dinas terkait seperti Dinas PUPR dan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek penting agar hasil yang dicapai lebih optimal dan berkelanjutan. Aspek tersebut terutama mencakup penguatan kolaborasi dengan pihak swasta seperti agen perjalanan dan event organizer yang saat ini masih terbatas, sehingga jangkauan promosi belum maksimal. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat masih perlu adanya penguatan kapasitas karena sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami potensi ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar pengembangan pariwisata Loksado dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam kajian implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan regulasi sebagai instrumen normatif, melainkan juga oleh tingkat aktualisasi kebijakan tersebut ke dalam tindakan operasional yang dapat diobservasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan wisatawan. Pada konteks pengembangan pariwisata di Loksado, implementasi kebijakan tersebut tercermin melalui penguatan sistem keselamatan wisatawan sebagai bagian integral dari peningkatan kualitas destinasi. Karakteristik kawasan yang didominasi oleh wisata berbasis alam dan aktivitas petualangan seperti bamboo rafting, trekking, dan wisata sungai mengandung tingkat risiko tertentu yang menuntut adanya sistem mitigasi keselamatan yang terstruktur. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diwujudkan melalui penyediaan tenaga keselamatan wisata yang kompeten, ketersediaan sarana keselamatan seperti pelampung dan helm, penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten, pemasangan rambu-rambu keselamatan pada area rawan risiko, serta penguatan mekanisme penanganan keadaan darurat melalui koordinasi lintas instansi terkait. Aspek keamanan dan kenyamanan merupakan determinan utama dalam pengembangan destinasi wisata, mengingat kedua aspek tersebut berkontribusi signifikan terhadap tingkat kunjungan serta kepuasan wisatawan (Wahyu Khalik, 2014)

Aktivitas kepariwisataan pada dasarnya memiliki Inherent Risk, sehingga jaminan keselamatan dan keamanan merupakan komponen esensial dalam pengelolaan destinasi wisata yang profesional (Titin Lestariningsih, 2023). Dengan demikian, peningkatan fasilitas keamanan wisatawan di kawasan Loksado tidak hanya merepresentasikan pemenuhan aspek teknis-operasional, tetapi juga mencerminkan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang bersifat komprehensif dan multidimensional. Hal ini mencakup dimensi regulatif, operasional, institusional, serta kolaboratif yang secara simultan berkontribusi dalam mewujudkan destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Loksado telah dilaksanakan secara sistematis dan menunjukkan arah yang positif dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah berbasis pariwisata. Hal ini tercermin dari pelaksanaan program pengembangan destinasi, pemasaran, serta sumber daya manusia dan ekonomi kreatif oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada aspek destinasi, kebijakan telah mendorong peningkatan aksesibilitas, pengembangan infrastruktur, penguatan daya tarik wisata, serta peningkatan fasilitas keamanan wisatawan melalui penyediaan petugas keselamatan, peralatan keselamatan, SOP, rambu keselamatan, dan kesiapsiagaan darurat. Namun demikian, implementasi masih terkendala keterbatasan anggaran dan pemeliharaan sarana prasarana. Pada aspek pemasaran, promosi telah dilakukan melalui media digital, konvensional, dan event pariwisata, meskipun belum optimal akibat terbatasnya kolaborasi dengan sektor swasta. Sementara itu, pada aspek SDM dan ekonomi kreatif, upaya pemberdayaan masyarakat telah dilakukan, namun masih terkendala keterbatasan kapasitas dan pemahaman masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Loksado telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan kolaborasi, kapasitas kelembagaan, dan sumber daya manusia untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

REFERENSI

- Dwityas, N., & Briandana, R. (2017). Developing tourism destination in Indonesia: A study of social media communication. *International Journal of Humanities and Social Science*, 7(8), 129–135. <https://doi.org/10.30845/ijhss>
- Fletcher, R. (2019). Ecotourism after humanism: Biodegradable capital and the "social life" of things. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(2), 226–241. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1542332>
- Gunn, C. A. (2002). *Tourism planning: Basics, concepts, cases* (4th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203056158>
- Ismayanti. (2010). *Pengantar pariwisata*. Grasindo.
- Khalik, W. (2014). Kajian kenyamanan dan keamanan wisatawan di kawasan pariwisata Kuta Lombok. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 1(1), 1–13.
- Lie, T. M., Rusmini, A., & Lestariningsih, T. (2024). Jaminan keamanan dan keselamatan pengunjung pada destinasi wisata. *MUTIARA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 80–90. <https://doi.org/10.61404/jimi.v2i1.95>
- Lupiyoadi, R. (2013). *Manajemen pemasaran jasa: Berbasis kompetensi*. Salemba Empat.
- Muljadi, A. J. (2009). *Kepariwisata dan perjalanan*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Pratt, S. (2015). The economic impact of tourism in SIDS: The case of Palau. *Tourism Management*, 48, 339–348. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.12.005>
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. GavaMedia.
- Rasoolimanesh, S. M., Ringle, C. M., Jaafar, M., & Ramayah, T. (2017). Urban vs. rural destinations: Residents' perceptions of tourism impacts. *Tourism Management*, 60, 26–38. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.11.014>
- Tjiptono, F. (2015). *Strategi pemasaran* (Ed. 4). Andi.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Widodo, A. (2007). *Analisis kebijakan publik*. Bayu Media.
- Winarno, B. (2002). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Media Pressindo.
- Yoeti, O. A. (2002). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. PT Pradaya Paramita.